

Evaluasi Kebijakan Diplomasi Kebudayaan Angklung Indonesia : Studi Kasus Kebijakan Komunikasi Pemerintah Pasca Diakuinya Angklung Dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Oleh UNESCO = The Evaluation of Cultural Diplomacy Policy of Indonesian Angklung : Case Study on Government Communication Policy after the Acknowledge of Angklung into the Representative List of Intangible Heritage of Humanity by UNESCO

Pardede, Theresia E.E., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20307916&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini mengevaluasi kebijakan komunikasi Pemerintah atas upaya pelestarian angklung, dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan sebagai bentuk komunikasi internasional. Instrumen angklung sendiri telah diakui sebagai warisan kebudayaan tak benda asal Indonesia oleh UNESCO pada November 2010 lalu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain evaluatif menggunakan model studi kasus. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan komunikasi Pemerintah sebagaimana dokumen komitmen yang ditandatangani pada sidang UNESCO tahun 2010 lalu belum terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan komunikasi yang integratif dari Pemerintah agar pengakuan angklung sebagai warisan kebudayaan tak benda ini dapat dioptimalkan sebagai alat diplomasi kebudayaan yang efektif bagi komunikasi internasional Indonesia.

Abstract

This thesis was evaluating the government communication policy for the safeguarding of angklung, regarding to the cultural diplomacy as a form of international communication. UNESCO has approved Angklung instrument itself as an intangible cultural heritage from Indonesia on November 2010. This research was using a qualitative method with an evaluated design in a study case model. Therefore, the result of this research showed that government communication policy, as a document of commitment that is signed in the UNESCO convention in the year 2010, hasn't been accomplished. This research was concluding that the integrated communication policy by the government for angklung existence as an intangible cultural heritage was needed to optimize the effectiveness of cultural diplomacy for the international communication of Indonesia.